

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kontribusi Penelitian	6

BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka	8
1. Landasan Teori	8
1.1. Agency Theory	8
1.2. Teori Pertanggungjawaban (<i>Stewardship Theory</i>) ..	9
1.3. Teori Stakeholder (<i>Stakeholder Theory</i>)	10
2. Kualitas Laporan Keuangan	11
2.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan	11
2.2. Kriteria Kualitas Laporan Keuangan	12

3. Standar Akuntansi Pemerintahan	15
3.1. Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan	15
3.2. Sifat dan Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintahan.....	15
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	21
4.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ..	21
4.2. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	21
5. Kejelasan Sasaran Anggaran	23
5.1. Definisi Kejelasan Sasaran Anggaran	23
5.2. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran	24
6. Penelitian Sebelumnya	30
B. Kerangka Pemikiran	45
C. Hipotesis	48
BAB III. DESAIN DAN METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	47
C. Populasi dan Sampel Penelitian	58
1. Populasi	58
2. Sampel	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Metode Analisis	59
1. Statistik Deskriptif	60

2. Uji Validitas	60
3. Uji Reliabilitas	62
4. Model spesifikasi dengan PLS	65
4.1. Inner model.....	65
4.2. Outer Model	65
4.3. Weight relation	67

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi obyek Penelitian	68
1. Deskripsi Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	70
2. Deskripsi Profil Responden Penelitian.....	71
B. Uji Asumsi dan Kualitas Instrumen Penelitian.....	73
1. Hasil Uji Deskriptif.....	73
1.1. Deskripsi Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	74
1.2. Deskripsi Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	78
1.3. Deskripsi Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran...	82
1.4. Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	83
2. Hasil Uji Validitas	86
3. Hasil Uji Reliabilitas	96

C. Mengevaluasi <i>Structural Model</i>	97
1. Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	99
2. Evaluasi <i>Measurement (Outer Model)</i>	99
2.1. <i>Measurement Model</i> Standar Akuntansi	
Pemerintahan	99
2.2. <i>Measurement Model</i> Sistem Pengendalian Internal	
Pemerintah	99
2.3. <i>Measurement Model</i> Kejelasan Sasaran Anggaran	105
2.4. <i>Measurement Model</i> Kualitas Laporan Keuangan	
Pemerintah Daerah	106
D. Pengujian Hipotesis	108
E. Pembahasan	114
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Reformasi keuangan negara di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya paket Undang-undang di bidang keuangan negara pada tahun 2003 dan 2004 mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), serta penerapan *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Reformasi keuangan negara mencakup reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini ditandai dengan kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan negara berupa laporan keuangan pemerintah yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya (Marwanto dkk, 2014:29).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, (Sihombing, 2011: 4).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai kualitas laporan keuangan daerah rata-rata masih rendah. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya daerah yang